

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Mei 2020/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
SUB UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ABDUL MUKTI SYARIFF**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
3. NHK : **748368**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.690.000.000**

1. Tanah Seluas 450 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/105 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah Seluas 10000 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 20000 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 956 m2/100 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
6. Tanah Seluas 5399 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 370 m2/120 m2 di BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **198.000.000**

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA G Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, HONDA GRAND ASTREA 125 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **---**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	92.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.980.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.980.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **13 Agustus 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.